



Keputusan Wali Kota  
No. 000.7.2 / 273 / 2026

Lampiran XXX

# RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027



KECAMATAN TINGKIR

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BAB I PENDAHULUAN .....                                                                                            | 1  |
| 1.1. Latar Belakang .....                                                                                          | 1  |
| 1.2. Landasan Hukum .....                                                                                          | 2  |
| 1.3. Maksud dan Tujuan .....                                                                                       | 4  |
| 1.4. Sistematika Penulisan .....                                                                                   | 4  |
| BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....                                                      | 6  |
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Kecamatan Tingkir Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Kecamatan Tingkir Tahun 2025..... | 6  |
| 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tingkir.....                                                             | 18 |
| 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD .....                                                    | 20 |
| 2.4. Review terhadap RENSTRA.....                                                                                  | 24 |
| 2.5. Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat.....                                                        | 35 |
| BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....                                                                   | 41 |
| 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....                                                                     | 41 |
| 3.1.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional .....                                                                    | 41 |
| 3.1.2. Telaah Terhadap Kebijakan Provinsi .....                                                                    | 43 |
| 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Tingkir .....                                                              | 44 |
| 3.3. Program dan Kegiatan.....                                                                                     | 47 |
| BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....                                                          | 51 |
| BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....                                                                  | 54 |
| BAB VI PENUTUP .....                                                                                               | 53 |

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 diatur bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan ketentuan pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, bahwa Perangkat daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Renstra memiliki nilai strategis dalam pembangunan yakni diantaranya sebagai penentu arah dan pedoman pembangunan, sebagai instrumen perencanaan dan pengendalian dalam hal penyusunan renja dan proses monitoring evaluasi, memastikan keterpaduan dan sinkronisasi, mendorong efektifitas dan efisiensi anggaran, sebagai instrumen akuntabilitas publik, mendorong partisipasi dan kolaborasi, serta menjamin keberlanjutan pembangunan.

Sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 126 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai persiapan penyusunan Renja Perangkat daerah dengan mempedomani Renstra Perangkat Daerah, evaluasi hasil Renja PD tahun sebelumnya dan hasil evaluasi hasil Renja PD tahun berjalan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tingkir Kota Salatiga Tahun 2027 didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023-2043;
18. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2045;
19. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Wali Kota Nomor 118 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
21. Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tingkir dimaksudkan untuk :

1. Memberi kerangka arah pembangunan dalam mewujudkan pencapaian Visi, Misi dan program serta sebagai indikator dan tolok ukur kemampuan kinerja Kecamatan Tingkir.
2. Sebagai jaminan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian serta pertanggungjawaban penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan Tingkir;
3. Indikator dalam pencapaian pemberdayaan masyarakat sebagai adalah satu unsur potensi sumber daya masyarakat secara efektif, efisien

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tingkir ini adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya jaminan sinergitas, sinkronisasi dan integritas bagi perencanaan pembangunan sebagai wujud penyaluran aspirasi bagi seluruh elemen masyarakat dan usulan dari lembaga yang ada di Kelurahan se Kecamatan Tingkir.
2. Terwujudnya kualitas penyelenggaraan kegiatan pembangunan yang kredibilitas dalam rangka mencapai Tata Pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip *Good Governance*.
3. Tersusunnya dasar acuan perencanaan strategis bagi Kecamatan Tingkir Kota Salatiga sehingga perencanaan pembangunan akan lebih terarah sesuai dengan aspirasi dari masyarakat dan usulan lembaga-lembaga di Kelurahan.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja Kecamatan Tingkir Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

|         |                                                                                                      |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 1.3 Maksud Dan Tujuan                                                                                |
|         | 1.4 Sistematika Penulisan                                                                            |
| BAB II  | : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN<br>TINGKIR TAHUN LALU                                   |
|         | 2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Kecamatan Tingkir Tahun<br>Lalu dan Capaian RENSTRA Kecamatan Tingkir |
|         | 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tingkir                                                     |
|         | 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi<br>Kecamatan Tingkir                            |
|         | 2.4 Review terhadap Rancangan RENSTRA.                                                               |
|         | 2.5 Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat                                                |
| BAB III | : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH                                                                |
|         | 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.                                                            |
|         | 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Tingkir                                                       |
|         | 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan                                                               |
| BAB IV  | : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH                                                       |
|         | Bab IV memuat uraian tentang Program, Kegiatan dan Sub<br>Kegiatan Kecamatan Sidomukti Tahun 2027.   |
| BAB V   | : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN                                                              |
|         | Bab V menyajikan Indikator Kinerja Utama Kecamatan<br>Tingkir                                        |
| BAB VI  | : PENUTUP                                                                                            |

## **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Kecamatan Tingkir Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Kecamatan Tingkir Tahun 2025**

Dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tingkir Tahun 2027, diperlukan evaluasi atas pelaksanaan Renja Tahun 2025 terhadap capaian Renstra dan evaluasi terhadap proyeksi capaian renja tahun berjalan. Pada Tahun 2025, Kecamatan Tingkir melaksanakan 5 (lima) program terdiri dari 14 (empat belas) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan, sebagian sudah tercapai dan dilaksanakan sesuai target. Target dan Realisasi Anggaran pada Kecamatan Tingkir Tahun 2025 mencapai 94,71% yakni Rp 18.259.637.200 dari total pagu sebesar Rp 19.279.620.926 dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten / Kota
  - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat daerah baru terealisasi 34,54% karena beberapa dokumen sudah *paperless*, selain itu kendala yang dihadapi adalah masih dianggarkannya rekening makan minum yang tidak dapat dicairkan apabila tidak melibatkan OPD lain dalam pelaksanaan rapat koordinasinya
  - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sudah baik karena sudah terealisasi 93,46% pada akhir Triwulan IV.
  - Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah terealisasi sangat baik yaitu 99,08% pada akhir Triwulan IV.
  - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah realisasi 0% karena adanya penghapusan pada APBD Perubahan 2025.
  - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sudah terealisasi 82,35% pada Triwulan IV.

- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sudah baik dengan terealisasi 84,55% di akhir Triwulan IV.
  - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terealisasi sangat baik 94,83%.
  - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sudah baik terealisasi 86,33% pada akhir Triwulan IV.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
    - Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terlaksana baik dengan realisasi yakni 83,24%.
    - Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan terealisasi dengan sangat baik yakni 98,74% pada Triwulan IV.
  3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
    - Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa sangat baik dengan terealisasi sebesar 97,48%.
    - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan pada Kelurahan Tingkir Tengah realisasi 99,42%. Kelurahan Tingkir Lor 99,47%, Kelurahan Kutowinangun Lor 99,31%, Kelurahan Kutowinangun Kidul 93,57%, Kelurahan Sidorejo Kidul 99,59%, Kelurahan Gendongan 99,48%, dan Kelurahan Kalibening 99,78%.
  4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
  5. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah terealisasi sebesar 65,73% dikarenakan ada rekening belanja seragam olahraga yang tidak bisa dicairkan.

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Desa realisasi yakni 69,10% dikarenakan terdapat pencairan honor petugas penyampaian SPPT PBB yang dianggarkan pada Triwulan IV.

Realisasi Anggaran Kecamatan Tingkir sampai Tahun 2025 sebesar Rp18.259.637.200 dari anggaran Rp 19.279.620.926, realisasi fisik 99,72%.

Realisasi Capaian Renstra Kecamatan Tingkir Tahun 2025 hampir semua target indikator dapat tercapai dengan komitmen penuh dari pelaksana kegiatan dan dukungan dari Lembaga dan OPD terkait serta tak lupa partisipasi penuh dari Masyarakat.

Tahun Anggaran 2026, Kecamatan Tingkir mempunyai 5 (lima) program, 11 (sebelas) kegiatan, 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan.

Adapun Evaluasi Pelaksanaan RENJA Kecamatan Tingkir Tahun 2025 dan Target RENSTRA Kecamatan Tingkir sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1.

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Tingkir dan Pencapaian Renstra Kecamatan Tingkir s/d Tahun 2025**  
**Kota Salatiga**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Tingkir

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah Dan<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Kinerja<br>Program (outcomes)/<br>Kegiatan (output)                                                       |         | Target<br>Kinerja<br>Capaian<br>Program<br>(Renstra<br>Perangkat<br>Daerah)<br>Tahun<br>2026 | Realisasi<br>Target Kinerja<br>Hasil Program<br>dan Keluaran<br>Kegiatan tahun<br>2024 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan<br>Kegiatan Tahun Lalu 2024 |                                                         |                          | Target<br>program<br>, kegiatan<br>dan<br>Sub Kegiatan<br>(Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>tahun<br>2026 | Perkiraan Realisasi Capaian<br>Target Renstra Perangkat<br>Daerah s/d tahun berjalan |                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                   | Satuan  |                                                                                              |                                                                                        | Target Renja<br>Perangkat<br>Daerah tahun<br>2025                    | Realisasi<br>Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>tahun 2025 | Tingkat<br>Realisasi (%) |                                                                                                          | Realisasi<br>Capaian<br>Program dan<br>Kegiatan s/d<br>tahun berjalan<br>2026        | Tingkat<br>Capaian<br>Realisasi<br>Target<br>Renstra<br>(%) |
| 1               | 2                                                                                               | 3                                                                                                                   |         | 4                                                                                            | 5                                                                                      | 6                                                                    | 7                                                       | 8=(7/6)                  | 9                                                                                                        | 10=(5+7+9)                                                                           | 11=(10/4)                                                   |
| 0 01 01         | Program<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota                        | Prosentase<br>terlaksananya<br>kegiatan pendukung<br>urusan<br>pemerintahan                                         | %       | 100,00                                                                                       | 100,00                                                                                 | 100,00                                                               | 100,00                                                  | 100,00                   | 100,00                                                                                                   | 100,00                                                                               | 100,00                                                      |
|                 |                                                                                                 | Indeks Kepuasan<br>Masyarakat (IKM)                                                                                 | Nilai   | 91,47                                                                                        | 91,45                                                                                  | 92,15                                                                | 91,65                                                   | 99,46                    | 100,00                                                                                                   | 94,37                                                                                | 103,17                                                      |
|                 |                                                                                                 | Nilai SAKIP<br>Perangkat Daerah                                                                                     | Nilai   | 72,36                                                                                        | 72,35                                                                                  | 72,35                                                                | 73,50                                                   | 101,59                   | 100,00                                                                                                   | 81,95                                                                                | 113,25                                                      |
| 7 01 01 2.01    | Perencanaan,<br>Penganggaran,<br>dan Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah                 | Prosentase<br>terlaksananya<br>kegiatan<br>perencanaan,<br>penganggaran dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | %       | 100,00                                                                                       | 100,00                                                                                 | 100,00                                                               | 100,00                                                  | 100,00                   | 100,00                                                                                                   | 100,00                                                                               | 100,00                                                      |
| 7 01 01 2.01 06 | Koordinasi dan<br>penyusunan                                                                    | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja dan                                                                               | laporan | 9                                                                                            | 9                                                                                      | 9                                                                    | 9                                                       | 100,00                   | 9                                                                                                        | 9,00                                                                                 | 100,00                                                      |

|   |    |    |      |    |                                                              |                                                                                                                                     |               |        |        |        |        |        |        |        |        |
|---|----|----|------|----|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|   |    |    |      |    | laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd  | Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |               |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 |    | <b>Admistrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                  | <b>Proesentase terlaksananya kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah</b>                                                    | %             | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |        |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN                            | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   | orang / bulan | 85     | 77     | 85     | 74     | 87,06  | 85     | 78,67  | 92,55  |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN                | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                  | doku men      | 12     | 12     | 12     | 12     | 100,00 | 12     | 12,00  | 100    |
| 7 | 01 | 01 | 2.03 |    | <b>Administasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b> | <b>Prosentase Terlaksananya pengamanan barang milik daerah SKPD</b>                                                                 | %             | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |        |
| 7 | 01 | 01 | 2.03 | 02 | Pengamaan barang milik daerah SKPD                           | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                  | doku men      | 2      | 2      | 2      | 2      | 100,00 | 2      | 2,00   | 100,00 |
| 7 | 01 | 01 |      |    | <b>Administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>             | <b>Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>                                                  | %             | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |        |
| 7 | 01 | 01 |      |    | Sosialisasi Peraturan                                        | Jumlah Orang yang Mengikuti                                                                                                         | orang         | 80     | 77     | 85     | 77     | 90,59  | 85     | 79,67  | 99,58  |

|   |    |    |      |    |                                                                  |                                                                                    |         |        |        |        |        |        |        |        |        |
|---|----|----|------|----|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|   |    |    |      |    | Perundang-Undangan                                               | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                           |         |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 |    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | <b>Prosentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah</b>                 | %       | 100,00 | 100,00 | 116,00 | 100,00 | 86,21  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | paket   | 1      | 1      | 1      | 1      | 100,00 | 1      | 1,00   | 100,00 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                | paket   | 2      | 2      | 2      | 2      | 100,00 | 2      | 2,00   | 100,00 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | paket   | 5      | 5      | 5      | 5      | 100,00 | 5      | 5,00   | 100,00 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                        | paket   | 2      | 2      | 2      | 2      | 100,00 | 2      | 2,00   | 100,00 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       | dokumen | 2      | 2      | 2      | 2      | 100,00 | 2      | 2,00   | 100,00 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                           | laporan | 1      | 1      | 1      | 1      | 100,00 | 1      | 1,00   | 100,00 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | laporan | 1      | 1      | 1      | 1      | 100,00 | 1      | 1,00   | 100,00 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis                                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip                                                 | dokumen | 1      | 1      | 1      | 1      | 100,00 | 1      | 1,00   | 100,00 |

|           |    |    |                                                                                                 |                                                                                                                    |                                                                                         |                |        |        |        |        |        |        |        |      |        |
|-----------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|
| pada SKPD |    |    |                                                                                                 | Dinamis<br>pada SKPD                                                                                               |                                                                                         |                |        |        |        |        |        |        |        |      |        |
| 7         | 01 | 01 | <b>Pengadaan<br/>Barang Milik<br/>Daerah<br/>Penunjang<br/>Urusan<br/>Pemerintah<br/>Daerah</b> | <b>Prosentase<br/>tersedianya<br/>pengadaan barang<br/>milik daerah<br/>penunjang urusan<br/>pemerintah daerah</b> | %                                                                                       | 100,00         | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |        |      |        |
| 7         | 01 | 01 | Pengadaan<br>Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan                   | Jumlah Unit<br>Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan yang<br>Disediakan                 | unit                                                                                    | 3              | 3      | 3      | 3      | 100    | 3      | 3,00   | 100,00 |      |        |
| 7         | 01 | 01 | Pengadaan Mebel                                                                                 | Jumlah Paket Mebel<br>yang Disediakan                                                                              | unit                                                                                    | 50             | 50     | 50     | 50     | 100    | 50     | 50,00  | 100,00 |      |        |
| 7         | 01 | 01 | Pengadaan<br>Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                     | Jumlah Unit<br>Peralatan dan Mesin<br>Lainnya yang<br>Disediakan                                                   | unit                                                                                    | 30             | 40     | 40     | 40     | 100    | 30     | 36,67  | 122,22 |      |        |
| 7         | 01 | 01 | Pengadaan<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Gedung Kantor<br>atau Bangunan<br>Lainnya               | Jumlah Unit<br>Sarana dan<br>Prasarana Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan Lainnya<br>yang Disediakan                | unit                                                                                    | 25             | 25     | 25     | 25     | 100    | 25     | 25,00  | 100,00 |      |        |
| 7         | 01 | 01 | Pengadaan Sarana<br>dan Prasarana<br>Pendukung<br>Gedung Kantor<br>atau<br>Bangunan<br>Lainnya  | Jumlah Unit Sarana<br>dan Prasarana<br>Pendukung Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan Lainnya<br>yang<br>Disediakan   | unit                                                                                    | 150            | 150    | 150    | 150    | 100    | 150    | 150,00 | 100,00 |      |        |
| 7         | 01 | 01 | 2.08                                                                                            | <b>Penyediaan Jasa<br/>Penunjang<br/>Urusan<br/>Pemerintahan<br/>Daerah</b>                                        | <b>Prosentase<br/>tersedianya jasa<br/>penunjang urusan<br/>pemerintahan<br/>daerah</b> | %              | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |      |        |
| 7         | 01 | 01 | 2.08                                                                                            | 01                                                                                                                 | Penyediaan Jasa                                                                         | Jumlah Laporan | lapora | 1      | 1      | 1      | 1      | 100,00 | 1      | 1,00 | 100,00 |





|   |    |    |      |    |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                              |         |        |        |       |        |        |       |       |        |
|---|----|----|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|
|   |    |    |      |    | Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                                | Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                       |         |        |        |       |        |        |       |       |        |
| 7 | 01 | 02 | 2.02 |    | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b> | <b>Persentase partisipasi masyarakat dalam efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan</b>                                                                                      | %       | 80     | 100    | 80    | 100    | 125,00 | 80    | 93,33 | 116,67 |
| 7 | 01 | 02 | 2.02 | 03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                      | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                                                                          | laporan | 2      | 2      | 2     | 2      | 100,00 | 2     | 2,00  | 100,00 |
| 7 | 01 | 03 |      |    | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                                                 | <b>Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel</b>                                                                                                                                                    | %       | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 100,00 | 200,00 | 50,00 | 83,33 | 83,33  |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 |    | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>                                                                              | <b>Persentase partisipasi masyarakat dalam Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dan Prosentase penigkatan partisipasi masyarakat Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</b> | %       | 80,00  | 100,00 | 80,00 | 100,00 | 125,00 | 80,00 | 93,33 | 116,67 |

|   |    |    |      |    |                                                                                                |                                                                                                                                                             |                        |       |        |       |        |        |       |        |        |
|---|----|----|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                  | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                                | laporan                | 6     | 6      | 6     | 6      | 100,00 | 6     | 6,00   | 100,00 |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 |    | <b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>                                                         | <b>Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dan Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</b> | %                      | 80,00 | 100,00 | 80,00 | 100,00 | 125,00 | 80,00 | 93,33  | 116,67 |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                               | lembaga kemasyarakatan | 8     | 8      | 8     | 8      | 100,00 | 8     | 8,00   | 100,00 |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                                                                        | unit                   | 8     | 8      | 8     | 8      | 100,00 | 8     | 8,00   | 100,00 |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                           | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                              | pokmas/ormas           | 7     | 7      | 7     | 7      | 100,00 | 7     | 7,00   | 100,00 |
| 7 | 01 | 05 |      |    | <b>PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>                                            | <b>Prosentase upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban di tingkat</b>                                                                                   | %                      | 100   | 100    | 100   | 100    | 100,00 | 100   | 100,00 | 100,00 |

|                     |                                                                                          |                                                                                                     |             |              |               |              |               |               |              |               |               |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
|                     | UMUM                                                                                     | wilayah                                                                                             |             |              |               |              |               |               |              |               |               |
|                     |                                                                                          | <b>Prosentase Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</b>                        | %           | <b>100</b>   | <b>100</b>    | <b>100</b>   | <b>100</b>    | <b>100,00</b> | <b>100</b>   | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>7 01 05 2.01</b> | <b>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>  | <b>Prosentase Terlaksananya kegiatan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</b>               | %           | <b>80</b>    | <b>100</b>    | <b>80</b>    | <b>100</b>    | <b>125,00</b> | <b>80</b>    | <b>93,33</b>  | <b>116,67</b> |
| 7 01 05 2.01 08     | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan                                    | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                         | doku<br>men | 1            | 1             | 1            | 1             | 100,00        | 1            | 1,00          | 100,00        |
| <b>7 01 06</b>      | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>                                | <b>Persentase penyampaian SPPT PBB pada WP</b>                                                      | %           | <b>83,49</b> | <b>83,48</b>  | <b>73,00</b> | <b>73,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>74,00</b> | <b>76,83</b>  | <b>92,02</b>  |
| <b>7 01 06 2.01</b> | <b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b> | <b>Persentase terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</b>    | %           | <b>80,00</b> | <b>100,00</b> | <b>80,00</b> | <b>100,00</b> | <b>125,00</b> | <b>80,00</b> | <b>93,33</b>  | <b>116,67</b> |
| 7 01 06 2.01 03     | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                         | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | doku<br>men | 2            | 2             | 2            | 2             | 100,00        | 2            | 2,00          | 100,00        |

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tingkir**

Berdasarkan Peraturan Wali kota Nomor 118 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kecamatan dan Kelurahan, Kecamatan mempunyai tugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan secara berkala antara lain rapat koordinasi secara rutin yang meliputi bidang pemerintahan, ketentraman, ketertiban, pembangunan dan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu juga menyelenggarakan koordinasi lintas sektoral.

Dalam hal pelayanan publik Kecamatan Tingkir telah melakukan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, melakukan pengawasan internal, penyuluhan kepada masyarakat serta pelayanan konsultasi. Bahkan Kecamatan Tingkir juga telah melaksanakan jemput bola pelayanan dengan melaksanakan Pelayanan Terpadu di tiap Kelurahan di wilayah Kecamatan Tingkir dengan menggandeng stake holder Bank Jateng untuk pelayanan pembayaran PBB, SMKN 3 Salatiga untuk pelayanan service kendaraan roda dua, Puskesmas Sidorejo Kidul untuk pelayanan cek kesehatan gratis dan pelayanan legalisasi administrasi surat kepada masyarakat sehingga warga tidak perlu harus ke kantor Kecamatan Tingkir.

Selanjutnya di bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan, Kecamatan Tingkir berupaya memberdayakan masyarakat untuk mewujudkan kemampuan, kemandirian masyarakat dan berkelanjutan yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya politik dan lingkungan hidup melalui penguatan lembaga kemasyarakatan dan penguatan kapasitas masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

Strategi yang digunakan dalam rangka penyusunan konsep perencanaan pembangunan yang merupakan sumber aspirasi dan keinginan masyarakat dituangkan dalam dokumen perencanaan

pembangunan sebagai dasar pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan Kecamatan Tingkir. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Tingkir berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 dari 3 (tiga) indikator yang ditetapkan sudah mencapai target dan jauh melebihi target yang telah ditetapkan. Data realisasi capaian disajikan pada tabel 2.2 sebagai berikut :

**Tabel 2.2. Capaian Kinerja Kecamatan Tingkir Tahun 2025**

| NO  | Indikator                                                   | SPM/<br>standar nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah |            |            |            | Realisasi Capaian |            | Proyeksi   |            | Catatan Tahun Analisis |
|-----|-------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|---------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------|
|     |                                                             |                          |     | Tahun 2025                      | Tahun 2026 | Tahun 2027 | Tahun 2028 | Tahun 2025        | Tahun 2026 | Tahun 2027 | Tahun 2028 |                        |
| (1) | (2)                                                         | (3)                      | (4) | (5)                             | (6)        | (7)        | (8)        | (9)               | (10)       | (11)       | (12)       | (13)                   |
| 1   | Persentase kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan   |                          | %-  | 75,00                           | 76,00      | 77,00      | 78,00      | 89,32             |            | 77,00      | 78,00      |                        |
| 2   | Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintahan kecamatan |                          | %   | 75,00                           | 76,00      | 77,00      | 78,00      | 90,09             |            | 77,00      | 78,00      |                        |
| 3   | Persentase capaian akuntabilitas pemerintahan kecamatan     |                          | %   | 75,00                           | 76,00      | 77,00      | 78,00      | 88,56             |            | 77,00      | 78,00      |                        |

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD**

Pemerintah Kecamatan Tingkir memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik yang efektif dan responsif. Upaya peningkatan kinerja kecamatan dilakukan dengan mengoptimalkan berbagai sumber daya dan menjalin sinergi antara aparat kecamatan, Lembaga masyarakat serta stakeholder terkait.

Pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan difokuskan pada peningkatan kapasitas warga melalui pelatihan, fasilitasi kelompok usaha, dan pemberian akses informasi yang memadai Program-program yang dikembangkan bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan local, sehingga tercipta kemandirian dan peningkatan kesejahteraan.

Penyelenggaraan pelayanan masyarakat di tingkat kecamatan diarahkan untuk memastikan pelayanan publik berjalan dengan cepat, transparan, dan akuntabel.

Tingkat kinerja kecamatan dalam menjalankan pemberdayaan dan pelayanan masyarakat saat ini menunjukkan hasil yang bervariasi, tergantung pada kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur, serta koordinasi dengan instansi yang lain dan peran masyarakat secara aktif cenderung menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan. Namun masih terdapat kendala-kendala seperti keterbatasan SDM, Fasilitas dan Infrastruktur yang belum memadai, Keterbatasan anggaran, Sistem pelayanan masih manual, Kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat, Keberlanjutan pemberdayaan masyarakat, dan Pengelolaan aduan masyarakat. Hingga saat ini pemerintahan Kota Salatiga belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya menjalankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Pemerintahan yang baik dalam tata kelola pemerintahan menjadikan kekuatan di dalam melaksanakan prinsip pelibatan Partisipasi Masyarakat (*Participation*), Tegaknya Supremasi Hukum

(*Rule of Law*), Transparansi (*Transparency*), Peduli pada Stakeholder/Dunia Usaha, Berorientasi pada Konsensus (*Consensus*), Kesetaraan (*Equity*), Efektivitas dan Efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*), Akuntabilitas (*Accountability*), dan Visi Strategis (*Strategic Vision*).

Terdapat kelemahan yakni belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Salatiga terlihat dari belum optimalnya pelayanan perangkat daerah di kecamatan/kelurahan. Berdasarkan pada situasi, kondisi dan permasalahan Kecamatan Tingkir diatas dan diselaraskan dengan prioritas peningkatan pelayanan prima di kecamatan, maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian khusus di kecamatan yaitu “Upaya Peningkatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat di Tingkat Kecamatan”.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Tingkir mempunyai tantangan sekaligus peluang dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja. Peluang yang dimiliki Kecamatan Tingkir antara lain:

- 1) Tuntutan implementasi *Good Governance* merupakan peluang pada Kecamatan Tingkir untuk meningkatkan kinerja;
- 2) Membuat perencanaan yang matang dan terorganisir untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi serta program/kegiatan yang akan dilaksanakan;
- 3) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait agar dapat mengakomodir usulan pembangunan dari masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat melalui hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan;
- 4) Penguatan kelembagaan masyarakat di kelurahan dan kecamatan untuk dapat saling koordinasi dan melakukan hubungan yang baik antara aparatur pemerintah Kecamatan dengan Kelurahan serta lembaga lintas sektoral untuk bersama-sama memberikan kesadaran akan pentingnya peran serta masyarakat pembangunan; dan

- 5) Implementasi Permendagri 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, sehingga usulan pembangunan bisa direalisasikan dengan kegiatan yang dilaksanakan di tingkat kelurahan.

Disamping adanya peluang, tentu ada beberapa hal yang menjadi tantangan yang dihadapi Kecamatan Tingkir antara lain:

- 1) Kecamatan hanya sebagai koordinator dalam penyelenggaraan Pemerintahan di wilayahnya, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota, sesuai karakteristik Wilayah, kebutuhan Daerah dan tugas Pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 2) Kurang optimalnya koordinasi dengan OPD terkait dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan sehingga mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- 3) Masih terbatasnya peran kecamatan dalam pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, sehingga kinerja lembaga kemasyarakatan belum optimal;
- 4) Dinamika kebutuhan masyarakat yang meningkat menyebabkan permintaan pelayanan juga akan meningkat baik kualitatif maupun kuantitatif;
- 5) Meningkatnya keterbukaan terhadap pelayanan publik, diperlukan sebuah standar pelayanan maupun standar operasional yang baku.

Dampaknya terhadap visi misi Wali Kota, tujuan, sasaran Pemerintah Daerah dan tercapainya program prioritas apabila peluang tidak bisa dioptimalkan dan tantangan tidak bisa terselesaikan antara lain:

- 1) Tidak tercapainya visi misi Wali Kota yang bisa menyebabkan menurunnya kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Wali Kota serta gagalnya pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah

Daerah yang menyebabkan Target pembangunan daerah tidak sesuai rencana, Kualitas pelayanan publik menurun, dan Indikator kinerja tidak tercapai;

- 2) Program prioritas terhambat yang menyebabkan kegiatan strategis yang seharusnya mendorong pembangunan daerah tidak berjalan optimal, alokasi anggaran menjadi tidak efektif dan berpotensi mubazir, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat terhambat;
- 3) Citra dan kepercayaan publik menurun yang bisa menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah daerah, dan kredibilitas pemerintah daerah di mata stakeholder (pemerintah pusat, swasta, investor, mitra kerja) berkurang.

Secara keseluruhan, peningkatan penyelenggaraan pemberdayaan dan pelayanan masyarakat di tingkat kecamatan memerlukan pemahaman secara keseluruhan yang melibatkan peningkatan kapasitas SDM, pengembangan infrastruktur teknologi informasi, serta penguatan kolaborasi atau kerja sama lintas sektor dan partisipasi masyarakat karena harapannya menjadi ujung tombak pelayanan public yang prima dan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

Program Unggulan/Prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk pencapaian visi “Terwujudnya Kota Salatiga Sebagai Kota BEDA: Bergerak, Energik, Dinamis dan Adaptif menuju Salatiga yang Mendunia” dan misi, Kecamatan Tingkir secara tidak langsung mendukung Program Unggulan/Proritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Salatiga yang disinkronkan dengan program nomenklatur perangkat daerah yang sesuai dengan Misi ke-3, Misi ke-4, dan Misi ke-5.

Misi ke-3 yakni Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsive terhadap pelayanan public yang berkualitas melalui peningkatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya aparatur, dengan prioritas program.

Misi ke-4 yakni Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berorientasi pemanfaatan tata ruang yang inklusif dan berkualitas melalui peningkatan kesadaran masyarakat, pemanfaatan teknologi dan penegakan hukum, dengan prioritas program.

Misi ke-5 yakni Mewujudkan infrastruktur perkotaan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan melalui pemerataan dan peningkatan kualitas, dengan prioritas program.

Isu strategis menjadi salah satu fondasi penting dalam mendukung keberhasilan Pembangunan daerah. Kecamatan sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kota memainkan peran vital dan garda terdepan dalam menghadirkan pelayanan yang cepat, responsif dan secara langsung memberikan dampak positif terhadap pencapaian visi dan misi Wali Kota, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota dan Program Prioritas.

Semakin diperkuatnya peran kecamatan dalam pemberdayaan dan pelayanan masyarakat, maka tata pemerintahan yang inklusif dan partisipatif dapat terwujud. Hal ini tidak hanya mempercepat visi-misi Wali Kota tetapi juga menciptakan kecamatan lebih adaptif, efisien dan berpihak pada kebutuhan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan dan pemberdayaan ditingkat kecamatan menjadi pilar penting dalam mewujudkan kota yang lebih manusiawi, berkeadilan dan berkelanjutan.

Kecamatan Tingkir berusaha berkontribusi pada perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel dan transparan dengan sasaran untuk meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.

#### **2.4. Review terhadap RENSTRA**

Review terhadap RENSTRA tahun 2025-2029 sebagaimana terlampir dapat dilihat pada Tabel 2.3, sangat perlu membandingkan antara RENSTRA pada Tahun 2027 dengan Hasil Analisa Kebutuhan Tahun 2027.

Keselarsan antara pagu dan hasil analisis kebutuhan yang paling tidak mendekati yakni mencerminkan perencanaan dilakukan secara matang, berbasis data dan telah mempertimbangkan prinsip efisiensi,

efektifitas serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Hasil review ini diharapkan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan penyusunan RKPD yang lebih tepat sasaran, responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mendukung optimalisasi penggunaan anggaran secara berkelanjutan.

**Tabel 2.3.**  
**Review terhadap Renstra OPD Tahun 2027**  
**Kota Salatiga**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan  
Tingkir

| No | RENSTRA KECAMATAN TINGKIR                                                             |          |                                                                                                   |                |                      | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN                                                              |                |                      | Catatan<br>Penting |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|
|    | Program / kegiatan / Sub Kegiatan                                                     | Lokasi   | Indikator Kinerja                                                                                 | Target Capaian | Pagu Indikatif (000) | Program / kegiatan / Sub Kegiatan                                                     | Target Capaian | Kebutuhan dana (000) |                    |
| 1  | 2                                                                                     | 3        | 4                                                                                                 | 5              | 6                    | 7                                                                                     | 10             | 11                   | 12                 |
|    | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                             | Salatiga | Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan                                   | 100            | 11.405.487.374       | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                             | 100            | 11.708.884.483       |                    |
|    |                                                                                       |          | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah                                                 | 91,48          | -                    | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah                                     | 91,48          | -                    |                    |
|    |                                                                                       |          | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                                                      | 72,37          | -                    | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                                          | 72,37          | -                    |                    |
| 1  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Salatiga | Prosentase terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100            | 5.000                | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 100            | 5.000                |                    |
| a  | Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Salatiga | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil              | 9              | 5.000                | Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd | 9              | 5.000                |                    |

|          |                                                               |          |                                                                                     |            |                |                                                               |            |                       |  |
|----------|---------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|--|
|          |                                                               |          | Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD   |            |                |                                                               |            |                       |  |
| <b>2</b> | <b>Admistrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                   | Salatiga | <b>Proesentase terlaksananya kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah</b>    | <b>100</b> | 10.845.874.277 | <b>Admistrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                   | <b>100</b> | <b>10.845.874.277</b> |  |
| a        | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN                             | Salatiga | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                   | 68         | 10.260.472.171 | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN                             | 68         | 10.260.472.171        |  |
| b        | Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN                 | Salatiga | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                  | 12         | 585.402.106    | Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN                 | 12         | 585.402.106           |  |
| <b>3</b> | <b>Administasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>  | Salatiga | <b>Proesntase Terlaksananya pengamanan barang milik daerah SKPD</b>                 | <b>100</b> | <b>9.000</b>   | <b>Administasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>  | <b>100</b> | <b>8.000</b>          |  |
| a        | Pengamaan barang milik daerah SKPD                            | Salatiga | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                  | 2          | 9.000          | Pengamaan barang milik daerah SKPD                            | 2          | 8.000                 |  |
| <b>4</b> | <b>Administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>              | Salatiga | <b>Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>  | <b>100</b> | <b>28.000</b>  | <b>Administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>              | <b>100</b> | <b>28.000</b>         |  |
| a        | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya        | Salatiga | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                              | 0          | -              | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya        | 0          | -                     |  |
| b        | Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi | Salatiga | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 80         | 10.000         | Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi | 80         | 10.000                |  |
| c        | Sosialisasi Peraturan                                         | Salatiga | Jumlah Orang yang                                                                   | 0          | -              | Sosialisasi Peraturan                                         | 0          | -                     |  |

|   |                                                                  |          |                                                                                    |      |         |                                                                  |      |         |  |
|---|------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------------------------------------------------------------------|------|---------|--|
|   | Perundang-Undangan                                               |          | Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                 |      |         | Perundang-Undangan                                               |      |         |  |
| 5 | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | Salatiga | <b>Prosentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah</b>                 | 100  | 474.000 | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | 100  | 456.000 |  |
| a | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Salatiga | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 2    | 50.000  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 2    | 50.000  |  |
| b | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Salatiga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                | 2    | 52.000  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | 2    | 52.000  |  |
| c | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Salatiga | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | 6    | 153.000 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | 6    | 145.000 |  |
| d | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Salatiga | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 2    | 47.000  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | 2    | 47.000  |  |
| e | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Salatiga | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan       | 4    | 22.000  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | 4    | 22.000  |  |
| f | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        | Salatiga | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                           | 1    | 10.000  | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        | 1    | 10.000  |  |
| g | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Salatiga | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 2    | 110.000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | 2    | 100.000 |  |
| h | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                            | Salatiga | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis                                         | 2000 | 30.000  | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                            | 2000 | 30.000  |  |

|          |                                                                              |          |                                                                                                |          |                |                                                                              |          |                |  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|--|
|          |                                                                              |          | pada SKPD                                                                                      |          |                |                                                                              |          |                |  |
| <b>6</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      | Salatiga | <b>Prosentase tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b> | <b>0</b> | -              | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      | <b>0</b> | -              |  |
| a        | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan            | Salatiga | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan            | 0        | -              | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan            | 0        | -              |  |
| b        | Pengadaan Mebel                                                              | Salatiga | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                             | 0        | -              | Pengadaan Mebel                                                              | 0        | -              |  |
| c        | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        | Salatiga | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                        | 0        | -              | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        | 0        | -              |  |
| d        | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Salatiga | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan           | 0        | -              | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | 0        | -              |  |
| e        | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Salatiga | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0        | -              | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 0        | -              |  |
| <b>7</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | Salatiga | <b>Prosentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>                        | <b>1</b> | <b>112.000</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | <b>1</b> | <b>107.000</b> |  |
| a        | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               | Salatiga | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                  | 1        | 7.000          | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               | 1        | 7.000          |  |
| b        | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Salatiga | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa                                                                 | 4        | 100.000        | Penyediaan Jasa Komunikasi,                                                  | 3        | 100.000        |  |

|          |                                                                                                                    |          |                                                                                                        |            |                |                                                                                                                    |            |                |  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--|
|          |                                                                                                                    |          | Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                |            |                | Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                        |            |                |  |
| c        | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Salatiga | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1          | 5.000          | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 1          | -              |  |
| <b>8</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | Salatiga | <b>Prosentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>                | <b>100</b> | <b>538.000</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>100</b> | <b>538.000</b> |  |
| a        | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Salatiga | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 2          | 70.000         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 2          | 70.000         |  |
| b        | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan               | Salatiga | Jumlah Kendaraan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya     | 60         | 73.000         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan               | 60         | 73.000         |  |
| c        | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Salatiga | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 4          | 280.000        | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | 4          | 280.000        |  |
| d        | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | Salatiga | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 170        | 100.000        | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | 170        | 100.000        |  |

|   |                                                                                                                           |          |                                                                                                                         |           |                  |                                                                                                                           |           |                  |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--|
| e | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                             | Salatiga | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                | 3         | 15.000           | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                             | 3         | 15.000           |  |
|   | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                                          | Salatiga | <b>Tingkat pencapaian pembangunan kelurahan dalam 1 tahun</b>                                                           | <b>85</b> | <b>267.187</b>   | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                                          | <b>85</b> | <b>283.000</b>   |  |
| 1 | <b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>                                              | Salatiga | <b>Persentase terlaksananya kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>             | <b>79</b> | <b>214.187</b>   | <b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>                                              | <b>79</b> | <b>225.000</b>   |  |
| a | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                        | Salatiga | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                       | 1         | 214.187          | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                        | 1         | 225.000          |  |
| 2 | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b> | Salatiga | <b>Persentase partisipasi masyarakat dalam efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan</b> | <b>80</b> | <b>53.000</b>    | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b> | <b>80</b> | <b>58.000</b>    |  |
| a | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                      | Salatiga | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                     | 8         | 53.000           | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                      | 8         | 58.000           |  |
|   | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                                                 | Salatiga | <b>Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel</b>                                                               | <b>55</b> | <b>7.340.022</b> | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                                                 | <b>55</b> | <b>7.540.000</b> |  |

|          |                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                                              |           |                  |                                                                                                |           |                  |  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--|
| <b>1</b> | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>                                                   | Salatiga | <b>Persentase partisipasi masyarakat dalam Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dan Prosentase penigkatan partisipasi masyarakat Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</b> | <b>80</b> | <b>300.000</b>   | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>                                                   | <b>80</b> | <b>300.000</b>   |  |
| a        | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                  | Salatiga | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                                                                                 | 4         | 300.000          | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                  | 4         | 300.000          |  |
| <b>2</b> | <b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>                                                         | Salatiga | <b>Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dan Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</b>                                                  | <b>80</b> | <b>7.040.022</b> | <b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>                                                         | <b>80</b> | <b>7.240.000</b> |  |
| a        | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Salatiga | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                | 6         | 140.000          | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 6         | 140.000          |  |
| b        | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                     | Salatiga | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (7                                                                                                                                                      | 55        | 3.852.022        | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (7 Kelurahan & TMMD)                                | 55        | 4.000.000        |  |

|          |                                                                                          |          |                                                                                                  |             |                |                                                                                          |             |                |  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--|
|          |                                                                                          |          | Kelurahan & TMMD)                                                                                |             |                |                                                                                          |             |                |  |
| c        | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                     | Salatiga | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (7 Kelurahan)     | 7           | 3.048.000      | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (7 Kelurahan)                                       | 7           | 3.100.000      |  |
|          | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>                                  | Salatiga | <b>Prosentase upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban di tingkat wilayah</b>                | <b>100</b>  | <b>16.047</b>  | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>                                  | <b>100</b>  | <b>16.000</b>  |  |
|          |                                                                                          | Salatiga | <b>Prosentase Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</b>                     | <b>100</b>  |                |                                                                                          | <b>100</b>  |                |  |
| <b>1</b> | <b>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>  | Salatiga | <b>Prosentase Terlaksananya kegiatan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</b>            | <b>80</b>   | <b>16.047</b>  | <b>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>  | <b>80</b>   | <b>16.000</b>  |  |
| a        | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan                                    | Salatiga | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                      | 1           | 16.047         | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan                                    | 1           | 16.000         |  |
|          | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>                                | Salatiga | <b>Persentase penyampaian SPPT PBB pada WP</b>                                                   | <b>83,5</b> | <b>140.413</b> | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>                                | <b>83,5</b> | <b>120.000</b> |  |
| <b>1</b> | <b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b> | Salatiga | <b>Persentase terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</b> | <b>80</b>   | <b>140.413</b> | <b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b> | <b>80</b>   | <b>120.000</b> |  |
| a        | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset                              | Salatiga | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan                                        | 2           | 140.413        | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan                                                 | 2           | 120.000        |  |

|               |      |  |                                                 |  |                   |                            |  |                   |  |
|---------------|------|--|-------------------------------------------------|--|-------------------|----------------------------|--|-------------------|--|
|               | Desa |  | Keuangan Desa dan<br>Pendayagunaan<br>Aset Desa |  |                   | Pendayagunaan Aset<br>Desa |  |                   |  |
| <b>Jumlah</b> |      |  |                                                 |  | <b>18.335.612</b> | <b>Jumlah</b>              |  | <b>18.651.000</b> |  |

**2.5. Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat**

Penelaahan usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan pada Rencana Kerja tahun 2027 belum ada karena usulan program kegiatan dari pemangku kepentingan diperoleh melalui musrenbang kelurahan maupun kecamatan sebagaimana terlampir dapat dilihat pada Tabel 2.4.

**Tabel 2.4.**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2027 Kota Salatiga**

Nama Perangkat Daerah :  
Kecamatan Tingkir

| No. | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                    | Lokasi                                  | Indikator Kinerja                                    | Besaran / Volume | Catatan          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|     | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                         |                                         | Tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbangkel   |                  |                  |
|     | <b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>                                            |                                         | Tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbangkel   |                  |                  |
|     | Sub. Keg Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                               |                                         |                                                      |                  |                  |
| 1.  | Pavingisasi Makam Gondang RW 3 dan RT 3 RW 6                                      | RW 3 dan RT 3 RW 6, Kel. Tingkir Tengah | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1Paket           | Swakelola Tipe 4 |
| 2.  | Pembangunan saluran drainase samping makam pule RW 1                              | RW 1, Kel. Tingkir Tengah               | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1Paket           | Swakelola Tipe 4 |
| 3.  | Pengadaan pagar pengaman jalan RW 04                                              | RW 4, Kel. Tingkir Tengah               | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1Paket           | Swakelola Tipe 4 |
| 4.  | Pembangunan dan perbaikan Drainase, jalan paving, dan fasilitas keamanan di RW 2, | RW 2, 4 dan 5, Kel. Tingkir Lor         | Jumlah Sarana dan Prasarana                          | 1 Paket          | Swakelola Tipe 4 |

|     |                                                                        |                                        |                                                      |                 |                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
|     | 4, dan 5                                                               |                                        | Kelurahan yang Terbangun                             |                 |                  |
| 5.  | Betonisasi Jalan di RW.06                                              | RW 6, Kel. Tingkir Lor                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 0,6 Paket       | Swakelola Tipe 4 |
| 6.  | Pembangunan saluran drainase di RT.04/RW.07                            | RT.04/RW.07, Kel. Tingkir Lor          | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Paket         | Swakelola Tipe 4 |
| 7.  | Betonisasi Jalan di RT.01/RW.03                                        | RT.01/RW.03, Kel. Tingkir Lor          | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 0,8 Paket       | Swakelola Tipe 4 |
| 8.  | Rehab Balai RT 02/RW.08                                                | RT 02/RW 08, Kel. Tingkir              | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1,295428 Paket  | Swakelola Tipe 4 |
| 9.  | Pagar besi pengaman jalan di RT 02/RW 01, tinggi 80 cm                 | RT 02/RW 01, Kel. Tingkir Lor          | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 0,64 Paket      | Swakelola Tipe 4 |
| 10. | Pengadaan tong sampah untuk Bank Sampah BASARA (RW.04) dan RT.03/RW.02 | RW 4 dan RT 03/RW 02, Kel. Tingkir Lor | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1,92286 Paket   | Swakelola Tipe 4 |
| 11. | Pengadaan sarpras (rak buku) untuk TBM RW.06                           | RW 6, Kel. Tingkir Lor                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Paket         | Swakelola Tipe 4 |
| 12. | Pavingisasi RW 1                                                       | RW 1, Kel. Kutowinangun Kidul          | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 0,39096 Paket   | Swakelola Tipe 4 |
| 13. | Pemeliharaan Paving RW 2                                               | RW 2, Kel. Kutowinangun Kidul          | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 0,2003 Paket    | Swakelola Tipe 4 |
| 14. | Pembangunan Balai RW 1                                                 | RW 1, Kel. Kutowinangun Kidul          | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 0,7621537 Paket | Swakelola Tipe 4 |
| 15. | Drainase RW 1,3,5,6 dan 7                                              | Kel. Kutowinangun Kidul                | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1,669501 Paket  | Swakelola Tipe 4 |
| 16. | Tutup Grill Saluran RW 08                                              | RW 8, Kel. Kutowinangun Kidul          | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang           | 0,69264 Paket   | Swakelola Tipe 4 |

|     |                                                                                                               |                               |                                                      |                         |                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
|     |                                                                                                               |                               | Terbangun                                            |                         |                  |
| 17. | Sumur Resapan RW 5                                                                                            | RW 5, Kel. Kutowinangun Kidul | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 0,132 Paket             | Swakelola Tipe 4 |
| 18. | Sumur Resapan RW 7                                                                                            | RW 7, Kel. Kutowinangun Kidul | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 0,24 Paket              | Swakelola Tipe 4 |
| 19. | Pengadaan CCTV, Gerobak dan Penampung Sampah (RW 2), HT dan Megaphone (RW 4), Terpal (RW 8) dan ALKES (KELSI) | Kel. Kutowinangun Kidul       | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 3,2568 Paket            | Swakelola Tipe 4 |
| 20. | Pembangunan dan perbaikan Drainase, jalan paving, dan fasilitas keamanan di RW 2, 4, dan 5                    | Kel. Kutowinangun Lor         | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1,84420554 Paket        | Swakelola Tipe 4 |
| 21. | Pengadaan sarpras lingkungan RW 1 dan RW 3                                                                    | Kel. Kutowinangun Lor         | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 23,12 Paket             | Swakelola Tipe 4 |
| 22. | Pengadaan sarpras lingkungan RW 4, RW 6, dan ILP                                                              | Kel. Kutowinangun Lor         | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 24,32766 Paket          | Swakelola Tipe 4 |
| 23. | Pavingisasi Jalan di Wilayah RW 01, RW 02, RW 03, RW 06 dan RW 09 Kel. Sidorejo Kidul                         | Kel. Sidorejo Kidul           | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 0,85 Paket              | Swakelola Tipe 4 |
| 24. | Betonisasi Jalan di Wilayah RW 04 dan RW 05 Kel. Sidorejo Kidul                                               | Kel. Sidorejo Kidul           | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 0,538686666666667 Paket | Swakelola Tipe 4 |
| 25. | Pembangunan Saluran Jalan Tani RT. 02 RW. 03 Druju Kel. Sidorejo Kidul                                        | Kel. Sidorejo Kidul           | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 0,87396 Paket           | Swakelola Tipe 4 |
| 26. | Rehab Atap Gumuk Sidul (lanjutan) RW 06 Gunungsari Kel. Sidorejo Kidul                                        | Kel. Sidorejo Kidul           | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1,08 Paket              | Swakelola Tipe 4 |
| 27. | Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu di Wilayah Kel. Sidorejo Kidul                                            | Kel. Sidorejo Kidul           | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1,275 Paket             | Swakelola Tipe 4 |
| 28. | Pengadaan Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman di Wilayah Kel. Sidorejo Kidul                               | Kel. Sidorejo Kidul           | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1,083308888888889 Paket | Swakelola Tipe 4 |

|     |                                                                                                     |                                |                                                                   |              |                                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|
| 29. | Drainase tertutup Rw 02                                                                             | Kel. Gendongan                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun              | 1,12 Paket   | Swakelola Tipe 4                     |
| 30. | Rehab Poskamling Rt 01 Rw 05                                                                        | Kel. Gendongan                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun              | 1,3 Paket    | Swakelola Tipe 4                     |
| 31. | Rehab balai RW 03                                                                                   | Kel. Gendongan                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun              | 0,6136 Paket | Swakelola Tipe 4                     |
| 32. | pengadaan sarpras RW 1,2,3,4,5 dan KSI                                                              | Kel. Gendongan                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun              | 18 Paket     | Swakelola Tipe 4                     |
| 33. | Pembangunan Balai RW 1                                                                              | Kel.Kalibenin g                | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun              | 1.1 Paket    | Swakelola Tipe 4                     |
| 34. | Pembangunan Balai RW 03                                                                             | Kel.Kalibenin g                | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun              | 1.7 Paket    | Swakelola Tipe 4                     |
| 35. | Pengadaan Tandon Air Jaringan Siluwing RT 3 RW 3                                                    | Kel.Kalibenin g                | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun              | 1 Paket      | Swakelola Tipe 4                     |
| 36. | Drainase Gang Depan Masjid An Nur - samping rumah M. Aridlo RT 3 RW 1                               | Kel.Kalibenin g                | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun              | 1,4 Paket    | Swakelola Tipe 4                     |
| 37. | Pengadaan sarpras posyandu (alat tes dan strip kolesterol dan asam urat)                            | Kel. Tingkir Tengah            | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat | 10 Paket     | Swakelola Tipe 4                     |
| 38. | Pengadaan kursi lipat, kursi plastik, tratak RW 7 dan sound system                                  | Kel. Tingkir Tengah            | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat | 10 Paket     | Swakelola Tipe 4                     |
| 39. | Pengadaan sarana prasarana inventaris RT/RW (CCTV, tenda panggung, kursi plastik, sound system dll) | RW 2, Kel. Gendongan           | Jumlah sarana prasarana kelurahan yang terbangun                  | 1 Paket      | Usulan masyarakat melalui pokir DPRD |
| 40. | Pengadaan sarana prasarana inventaris RT/RW (CCTV, tenda panggung, kursi plastik, sound system dll) | RT 2 RW 6, Kel. Tingkir Tengah | Jumlah sarana prasarana kelurahan yang terbangun                  | 1 Paket      | Usulan masyarakat melalui pokir DPRD |
| 41. | Pengadaan sarana prasarana                                                                          | RT 2 RW 3,                     | Jumlah sarana                                                     | 1 Paket      | Usulan masyarakat                    |

|     |                                                                                                     |                                |                                                  |         |                                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|
|     | inventaris RT/RW (CCTV, tenda panggung, kursi plastik, sound system dll)                            | Kel. Tingkir Lor               | prasarana kelurahan yang terbangun               |         | melalui pokir DPRD                   |
| 42. | Pengadaan sarana prasarana inventaris RT/RW (CCTV, tenda panggung, kursi plastik, sound system dll) | RT 2 RW 1, Kel. Tingkir Lor    | Jumlah sarana prasarana kelurahan yang terbangun | 1 Paket | Usulan masyarakat melalui pokir DPRD |
| 43. | Pengadaan sarana prasarana inventaris RT/RW (CCTV, tenda panggung, kursi plastik, sound system dll) | RW 4, Kel. Tingkir Lor         | Jumlah sarana prasarana kelurahan yang terbangun | 1 Paket | Usulan masyarakat melalui pokir DPRD |
| 44. | Pengadaan sarana prasarana inventaris RT/RW (CCTV, tenda panggung, kursi plastik, sound system dll) | RT 2 RW 2, Kel. Tingkir Lor    | Jumlah sarana prasarana kelurahan yang terbangun | 1 Paket | Usulan masyarakat melalui pokir DPRD |
| 45. | Pengadaan sarana prasarana inventaris RT/RW (CCTV, tenda panggung, kursi plastik, sound system dll) | RT 4 RW 6, Kel. Tingkir Tengah | Jumlah sarana prasarana kelurahan yang terbangun | 1 Paket | Usulan masyarakat melalui pokir DPRD |
| 46. | Pengadaan sarana prasarana inventaris RT/RW (CCTV, tenda panggung, kursi plastik, sound system dll) | RW 5, Kel. Gendongan           | Jumlah sarana prasarana kelurahan yang terbangun | 1 Paket | Usulan masyarakat melalui pokir DPRD |
| 47. | Pengadaan sarana prasarana inventaris RT/RW (CCTV, tenda panggung, kursi plastik, sound system dll) | RW 2, Kel. Tingkir Tengah      | Jumlah sarana prasarana kelurahan yang terbangun | 1 Paket | Usulan masyarakat melalui pokir DPRD |
| 48. | Pengadaan sarana prasarana inventaris RT/RW (CCTV, tenda panggung, kursi plastik, sound system dll) | RT 3 RW 2, Kel. Gendongan      | Jumlah sarana prasarana kelurahan yang terbangun | 1 Paket | Usulan masyarakat melalui pokir DPRD |
| 49. | Pengadaan sarana prasarana inventaris RT/RW (CCTV, tenda panggung, kursi plastik, sound system dll) | RT 2 RW 2, Kel. Gendongan      | Jumlah sarana prasarana kelurahan yang terbangun | 1 Paket | Usulan masyarakat melalui pokir DPRD |
| 50. | Pengadaan sarana prasarana inventaris RT/RW (CCTV, tenda panggung, kursi plastik, sound system dll) | RT 1 RW 2, Kel. Kalibening     | Jumlah sarana prasarana kelurahan yang terbangun | 1 Paket | Usulan masyarakat melalui pokir DPRD |
| 51. | Pengadaan sarana prasarana inventaris RT/RW (CCTV, tenda panggung, kursi plastik, sound system dll) | RT 3 RW 3, Kel. Tingkir Lor    | Jumlah sarana prasarana kelurahan yang terbangun | 1 Paket | Usulan masyarakat melalui pokir DPRD |
| 52. | Pengadaan sarana prasarana inventaris RT/RW (CCTV, tenda panggung, kursi plastik, sound system dll) | RT 4 RW 8, Kel. Tingkir Tengah | Jumlah sarana prasarana kelurahan yang terbangun | 1 Paket | Usulan masyarakat melalui pokir DPRD |
| 53. | Pengadaan sarana prasarana inventaris RT/RW (CCTV, tenda panggung, kursi plastik, sound system dll) | RW 8, Kel. Tingkir Tengah      | Jumlah sarana prasarana kelurahan yang terbangun | 1 Paket | Usulan masyarakat melalui pokir DPRD |
| 54. | Pengadaan sarana prasarana inventaris RT/RW (CCTV, tenda panggung, kursi plastik, sound system dll) | RT 1 RW 4, Kel. Sidorejo Kidul | Jumlah sarana prasarana kelurahan yang terbangun | 1 Paket | Usulan masyarakat melalui pokir DPRD |
| 55. | Pengadaan sarana prasarana inventaris RT/RW (CCTV, tenda panggung, kursi plastik, sound system dll) | RT 4 RW 4, Kel. Sidorejo Kidul | Jumlah sarana prasarana kelurahan yang terbangun | 1 Paket | Usulan masyarakat melalui pokir DPRD |
| 56. | Pengadaan sarana prasarana inventaris RT/RW (CCTV,                                                  | RT 8 RW 2, Kel.                | Jumlah sarana prasarana                          | 1 Paket | Usulan masyarakat                    |

|     |                                                                                                     |                                    |                                                  |         |                                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|
|     | tenda panggung, kursi plastik, sound system dll)                                                    | Kutowinangun Lor                   | kelurahan yang terbangun                         |         | melalui pokir DPRD                   |
| 57. | Pengadaan sarana prasarana inventaris RT/RW (CCTV, tenda panggung, kursi plastik, sound system dll) | RT 11 RW 3, Kel. Kutowinangun Lor  | Jumlah sarana prasarana kelurahan yang terbangun | 1 Paket | Usulan masyarakat melalui pokir DPRD |
| 58. | Pengadaan sarana prasarana inventaris RT/RW (CCTV, tenda panggung, kursi plastik, sound system dll) | RT 2 RW 2, Kel. Kutowinangun Lor   | Jumlah sarana prasarana kelurahan yang terbangun | 1 Paket | Usulan masyarakat melalui pokir DPRD |
| 59. | Pengadaan sarana prasarana inventaris RT/RW (CCTV, tenda panggung, kursi plastik, sound system dll) | RT 13 RW 2, Kel. Kutowinangun Lor  | Jumlah sarana prasarana kelurahan yang terbangun | 1 Paket | Usulan masyarakat melalui pokir DPRD |
| 60. | Pengadaan sarana prasarana inventaris RT/RW (CCTV, tenda panggung, kursi plastik, sound system dll) | RW 6, Kel. Kutowinangun Lor        | Jumlah sarana prasarana kelurahan yang terbangun | 1 Paket | Usulan masyarakat melalui pokir DPRD |
| 61. | Pengadaan sarana prasarana inventaris RT/RW (CCTV, tenda panggung, kursi plastik, sound system dll) | RT 8 RW 1, Kel. Kutowinangun Kidul | Jumlah sarana prasarana kelurahan yang terbangun | 1 Paket | Usulan masyarakat melalui pokir DPRD |
| 62. | Pengadaan sarana prasarana inventaris RT/RW (CCTV, tenda panggung, kursi plastik, sound system dll) | RW 8, Kel. Sidorejo Kidul          | Jumlah sarana prasarana kelurahan yang terbangun | 1 Paket | Usulan masyarakat melalui pokir DPRD |
| 63. | Pengadaan sarana prasarana inventaris RT/RW (CCTV, tenda panggung, kursi plastik, sound system dll) | RW 5, Kel. Kutowinangun Lor        | Jumlah sarana prasarana kelurahan yang terbangun | 1 Paket | Usulan masyarakat melalui pokir DPRD |

## **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

#### **3.1.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional**

Kebijakan Nasional yang didukung oleh tugas dan fungsi kecamatan adalah pada Prioritas Nasional sesuai Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yaitu membangun dari kelurahan dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan dan memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, antara lain bertujuan untuk mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah. Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan, dalam PP ini disebutkan, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat. Pembentukan Kecamatan, menurut PP ini, dilakukan melalui: a. pemekaran 1 (satu) kecamatan menjadi 2 (dua) kecamatan atau lebih; b. penggabungan bagian Kecamatan dari Kecamatan lainnya yang bersandingan dalam satu daerah kabupaten/kota menjadi Kecamatan baru. PP ini juga mengatur mengenai masalah Kelurahan, dari pembentukan hingga kedudukan Kelurahan dan tugas Lurah, termasuk juga masalah pendanaan, dan pakaian dinas Camat dan Lurah.

Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, mewajibkan semua Pemerintah daerah untuk mengimplementasikan kedua peraturan tersebut.

Dalam rangka penerapan pengelolaan data dan informasi, penyusunan, monitoring serta evaluasi dokumen rencana pembangunan daerah secara elektronik, telah di terbitkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Kecamatan Tingkir mempunyai 2 sasaran yaitu:

- 1. Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di lingkungan pemerintahan kecamatan
- 2. Meningkatnya kualitas akuntabilitas kecamatan

**Tabel 3.1.**  
**Dukungan Program dan Kegiatan Daerah Terhadap Program Prioritas Nasional**

| No | Prioritas Nasional | Program | Aktivitas |
|----|--------------------|---------|-----------|
|    | NIHIL              | NIHIL   | NIHIL     |

### 3.1.2. Telaah Terhadap Kebijakan Provinsi

Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 adalah Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi. Adapun strategi Kecamatan Tingkir dalam mencapainya adalah “Mengoptimalkan koordinasi perencanaan Pembangunan dengan OPD, para pemangku kepentingan, penyediaan dan penyajian data pendukung perencanaan Pembangunan.”

Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 menjadi salah satu acuan di dalam penyusunan arah kebijakan di Kota Salatiga, sekaligus merupakan kerangka strategis yang menunjukkan tujuan, prioritas, dan fokus utama pembangunan Kota Salatiga berdasarkan pada target yang ingin dicapai dalam misi, tujuan dan sasaran.

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga tahun 2025-2045 dan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga tahun 2025-2029 mengandung arah kebijakan Kecamatan Tingkir Tahun 2025-2029 yakni “Meningkatkan kualitas pelayanan, administrasi tingkat kecamatan dan kelurahan, mengembangkan kerjasama dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan perangkat daerah ditingkat kecamatan dan kelurahan.”

**Tabel 3.2.**

**Dukungan Program dan Kegiatan Daerah Terhadap Program Prioritas Provinsi**

| No | Prioritas Provinsi                                                                                                         | Program                                            | Aktivitas           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| 1  | Pembentukan Kecamatan Berdaya (Pemberdayaan Ekonomi bagi Disabilitas, Perempuan, Pelaku Ekonomi Kreatif, dan Sport Center) | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Peningkatan Ekonomi |

**3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Tingkir**

Tujuan dan sasaran Kecamatan Tingkir mengacu tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dalam rangka menjawab isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi kecamatan. Adapun misi yang berkaitan langsung dengan Kecamatan Tingkir adalah misi ke-3 yaitu “tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap pelayanan publik yang berkualitas melalui peningkatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya aparatur”.

Tujuan merupakan pernyataan tentang kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan misi, pemecahan masalah serta penanganan isu strategis yang akan dihadapi dalam periode 2025-2029. Penentuan tujuan Kecamatan Tingkir Tahun 2025–2029 disusun dengan mengacu kepada Misi ke-3 RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025–2029. Tujuan Pembangunan daerah Kota Salatiga berdasarkan RPJMD adalah Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berbasis Digital. Adapun tujuan jangka menengah Kecamatan Tingkir Tahun 2025-2029 adalah “Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan”.

Sasaran merupakan gambaran hal-hal yang akan dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian

tujuan. Sasaran Pembangunan daerah Kota Salatiga berdasarkan RPJMD adalah “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital dan berintegritas tinggi menuju pelayanan publik prima.”

Sedangkan sasaran jangka menengah Kecamatan Tingkir tahun 2025-2029 adalah:

1. Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di lingkungan pemerintahan kecamatan; dan
2. Meningkatkan Kualitas akuntabilitas kecamatan

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tingkir Tahun 2027 sesuai dengan RENSTRA Kecamatan Tingkir Tahun 2025-2029 bisa dilihat pada tabel 3.3.

**Tabel 3.3. Tujuan dan Sasaran Renja**

| Tujuan                                                                                                  | Sasaran                                                                                                                                       | Indikator                                                 | Definisi Operasional/<br>Rumus                                                                                    | Satuan | Capaian 2025 | Target 2027 | Target 2030 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------|-------------|
| 1                                                                                                       | 2                                                                                                                                             | 3                                                         | 4                                                                                                                 | 5      | 7            | 8           | 9           |
| Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan. |                                                                                                                                               | Persentase Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan | Realisasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan : Rencana Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan | %      | 70           | 72          | 78          |
|                                                                                                         | Meningkatnya fasilitas dan koordinasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di lingkungan pemerintahan kecamatan | Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Pemerintah Kecamatan | Realisasi Capaian Kinerja Pelayanan Pemerintah Kecamatan : Rencana Capaian Kinerja Pelayanan Pemerintah Kecamatan | %      | 75           | 77          | 80          |
|                                                                                                         | Meningkatnya kualitas akuntabilitas pemerintah kecamatan                                                                                      | Persentase Capaian Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan     | Realisasi Capaian Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan : Rencana Capaian Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan         | %      | 75           | 77          | 80          |

Kecamatan Tingkir tidak menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana terlihat pada Tabel 3.4. Selain itu, Perangkat Daerah menetapkan program dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Kota yang

merupakan program kegiatan yang disusun pada OPD mengacu pada prioritas dan sasaran pembangunan yang disusun pada level kota tahun berkenaan. Dukungan Program dan Kegiatan Daerah terhadap Prioritas Kota serta Kebijakan Tematik dapat dilihat pada Tabel 3.5 & Tabel 3.6

**Tabel 3.4.**  
**Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Tingkir**

| No | Indikator | Definisi<br>Operasional/<br>Rumus | Satuan | Capaian<br>2025 | Target<br>2027 | Target<br>2030 | Keterangan |
|----|-----------|-----------------------------------|--------|-----------------|----------------|----------------|------------|
|    | NIHIL     | NIHIL                             | NIHIL  | NIHIL           | NIHIL          | NIHIL          |            |

**Tabel 3.5.**  
**Dukungan Program dan Kegiatan Daerah terhadap Prioritas Kota**

| No | Prioritas Kota                                                           | Program                                                                                                                                                        | Aktivitas                                                                                                                                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Program SI AKAS<br>(Salatiga Akuntabel, Kolaboratif, Adaptif, dan Sigap) | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                                                                                                             | Membangun sistem pengaduan pelayanan publik terpadu                                                                                                                                                |
| 2  | Program SARI<br>(Salatiga Lestari)                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</li> <li>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</li> </ul> | Membangun sistem pengelolaan sampah terpadu di tingkat kecamatan/kelurahan                                                                                                                         |
| 3  | Program SOS<br>(Salatiga on System)                                      | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik                                                                                                      | Mendukung Pembangunan infrastruktur jaringan online terpadu untuk pengawasan infrastruktur, lingkungan hidup dan mobilitas masyarakat, yang berpusat pada Command Center tingkat keamanan dan kota |

**Tabel 3.6.**

**Dukungan Program dan Kegiatan Daerah terhadap Kebijakan Tematik**

| No | Jenis Kebijakan Tematik | Program                                    | Aktivitas                                                 |
|----|-------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1  | Penanggulangan Stunting | Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Posyandu dan RPPA (Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak) |

**3.3. Program dan Kegiatan**

Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan Tingkir Tahun 2027 terdiri dari :

- Program : 5 program
- Kegiatan : 13 kegiatan
- Sub Kegiatan: 31 sub kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Tingkir Tahun 2027 sebagai berikut :

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Rp 11.405.487.374,00).**

**Indikator Program: Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan**

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah (Rp 4.000.000,00).
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Rp 4.000.000,00)
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah (Rp10.845.874.277,00).
  - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN (Rp 10.260.472.171,00)
  - Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (Rp 585.402.106,00)
- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah (Rp 20.000.000,00).

- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Rp 20.000.000,00)
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, tidak dianggarkan di Tahun 2027 karena efisiensi dan prioritas untuk kegiatan lain yang lebih penting dan harus didahulukan.
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Rp 188.803.097,00).
  - Penyediaan komponen instalasi Listrik / Penerangan bangunan kantor (Rp 15.000.000,00)
  - Penyediaan peralatan rumah tangga (Rp 20.000.000,00)
  - Penyediaan bahan logistik kantor (Rp 58.803.097,00)
  - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Rp 20.000.000,00)
  - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, untuk Tahun 2027 tidak dianggarkan.
  - Fasilitas kunjungan tamu (Rp5.000.000,00)
  - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Rp70.000.000,00)
  - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, untuk Tahun 2027 tidak teranggarkan.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Rp 168.000.000,00).
  - Penyediaan jasa peralatan umum kantor (Rp 168.000.000,00)
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Rp 128.810.000,00).
  - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan (Rp 40.050.000,00)
  - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan (Rp 63.760.000,00)
  - Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya (Rp 25.000.000,00)

**2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik ( Rp 33.950.000,00)**

**Indikator Program:**

- a. Prosentase dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan**
- b. Prosentase laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan**
- Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Rp 5.850.000,00)
  - Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Rp 5.850.000,00)
- Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan (Rp 28.100.000,00)
  - Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan (Rp 28.100.000,00)

**3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Rp 4.583.650.462,00)**

**Indikator Program:**

- a. Prosentase dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di Tingkat Kecamatan**
- b. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang**
- Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (Rp 128.636.118,00).
  - Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan (Rp 128.636.118,00)
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Rp 4.455.014.344,00).
  - Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan (Rp 125.900.000,00)
  - Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan (Rp 141.300.000,00)

**4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Rp 14.000.000,00)**

**Indikator Program:**

- a. Prosentase upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban di tingkat wilayah**
- b. Prosentase Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan**
  - Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala daerah (Rp 14.000.000,00)
    - Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan (Rp 14.000.000,00)

**5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Rp 61.924.323,00)**

**Indikator Program : Persentase penyampaian SPPT PBB pada WP**

- Kegiatan fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Rp 61.924.323,00).
  - Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pengayagunaan aset desa (Rp 61.924.323,00)

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasarannya serta upaya pemenuhan kinerja urusan penunjang yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tingkir, pada Tahun 2027 Kecamatan Tingkir akan melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Tingkir Tahun 2027**

| Kode Rekening       | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan            | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| (1)                 | (2)                                                                                   | (3)                            |
| <b>7 01 01</b>      | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>                      | <b>11.405.487.374</b>          |
| <b>7 01 01 2.01</b> | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>               | <b>4.000.000</b>               |
| 7 01 01 2.01 06     | Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd | 4.000.000                      |
| <b>7 01 01 2.02</b> | <b>Admistrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                           | <b>10.845.874.277</b>          |
| 7 01 01 2.02 01     | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN                                                     | 10.260.472.171                 |
| 7 01 01 2.02 02     | Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN                                         | 585.402.106                    |
| <b>7 01 01 2.03</b> | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                         | <b>20.000.000</b>              |
| 7 01 01 2.03 02     | Pengamaan barang milik daerah SKPD                                                    | 20.000.000                     |
| <b>7 01 01</b>      | <b>Administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>                                      | -                              |
| 7 01 01 2.05 02     | Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya                                | -                              |
| 7 01 01 2.05 09     | Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi                         | -                              |
| <b>7 01 01 2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                             | <b>188.803.097</b>             |
| 7 01 01 2.06 01     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/                                                | 15.000.000                     |

|          |           |           |             |     |                                                                                                                    |                   |
|----------|-----------|-----------|-------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|          |           |           |             |     | Penerangan BangunanKantor                                                                                          |                   |
| 7        | 01        | 01        | 2.06        | 03  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                  | 20.000.000        |
| 7        | 01        | 01        | 2.06        | 04  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | 58.803.097        |
| 7        | 01        | 01        | 2.06        | 05  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | 20.000.000        |
| 7        | 01        | 01        | 2.06        | 06  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                           | -                 |
| 7        | 01        | 01        | 2.06        | 08  | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                          | 5.000.000         |
| 7        | 01        | 01        | 2.06        | 09  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | 70.000.000        |
| 7        | 01        | 01        | 2.06        | 010 | Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD                                                                                   | -                 |
| <b>7</b> | <b>01</b> | <b>01</b> | <b>2.08</b> |     | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                        | 168.000.000       |
| 7        | 01        | 01        | 2.08        | 03  | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor                                                                  | 168.000.000       |
| <b>7</b> | <b>01</b> | <b>01</b> | <b>2.09</b> |     | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | 128.810.000       |
| 7        | 01        | 01        | 2.09        | 01  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 40.050.000        |
| 7        | 01        | 01        | 2.09        | 02  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan               | 63.760.000        |
| 7        | 01        | 01        | 2.09        | 10  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | 25.000.000        |
| <b>7</b> | <b>01</b> | <b>02</b> |             |     | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                                   | <b>33.950.000</b> |
| <b>7</b> | <b>01</b> | <b>02</b> | <b>2.01</b> |     | <b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>                                       | 5.850.000         |
| 7        | 01        | 02        | 2.01        | 02  | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                 | 5.850.000         |
| <b>7</b> | <b>01</b> | <b>02</b> | <b>2.02</b> |     | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada</b>       | <b>28.100.000</b> |

|          |           |           |             |    |                                                                                                 |                      |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|          |           |           |             |    | <i>di Kecamatan</i>                                                                             |                      |
| 7        | 01        | 02        | 2.02        | 03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan            | 28.100.000           |
| <b>7</b> | <b>01</b> | <b>03</b> |             |    | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                       | <b>4.583.650.462</b> |
| <b>7</b> | <b>01</b> | <b>03</b> | <b>2.01</b> |    | <b><i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i></b>                                             | <b>128.636.118</b>   |
| 7        | 01        | 03        | 2.01        | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                   | 128.636.118          |
| <b>7</b> | <b>01</b> | <b>03</b> | <b>2.02</b> |    | <b><i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i></b>                                                   | <b>4.455.014.344</b> |
| 7        | 01        | 03        | 2.02        | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan  | 125.900.000          |
| 7        | 01        | 03        | 2.02        | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                      | 141.300.000          |
| <b>7</b> | <b>01</b> | <b>05</b> |             |    | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>                                         | <b>14.000.000</b>    |
| <b>7</b> | <b>01</b> | <b>05</b> | <b>2.01</b> |    | <b><i>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i></b>  | <b>14.000.000</b>    |
| 7        | 01        | 05        | 2.01        | 08 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan                                           | 14.000.000           |
| <b>7</b> | <b>01</b> | <b>06</b> |             |    | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>                                       | <b>61.924.323</b>    |
| <b>7</b> | <b>01</b> | <b>06</b> | <b>2.01</b> |    | <b><i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i></b> | <b>61.924.323</b>    |
| 7        | 01        | 06        | 2.01        | 03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                                | 61.924.323           |

BAB V

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

5.1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2027 dan Evaluasi Hasil Renja PD Tahun 2025

Berdasarkan Renstra Kecamatan Tingkir Tahun 2025-2029  
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tingkir adalah sebagai berikut :

Tabel5.1

Tabel Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tingkir Tahun 2027

| Indikator Kinerja Utama                                   | Definisi Operasional/Rumus                                                                                                                                                                                                                       | Satuan | Target 2025 | Capaian 2025 | Target Renstra 2027 |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------|---------------------|
| Persentase Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan | Rata2 capaian kinerja indikator sasaran persentase capaian kinerja pelayanan pemerintahan kecamatan dan persentase capaian akuntabilitas pemerintahan kecamatan                                                                                  | %      | 75          | 89,32        | 77                  |
| Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Pemerintah Kecamatan | rata2 capaian kinerja Tingkat pencapaian pembangunan kelurahan dalam 1 tahun, Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel, Prosentase Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan, Persentase penyampaian SPPT PBB pada WP | %      | 75          | 90,09        | 77                  |
| Persentase Capaian Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan     | rata2 capaian kinerja Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah, dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                                                       | %      | 75          | 88,56        | 77                  |

**5.2 Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Kecamatan Tingkir bukan merupakan OPD yang mempunyai Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Tabel 5.2  
Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Sidorejo

| No | Indikator | Definisi Operasional/Rumus | Satuan | capaian 2025 | Target 2027 | Target 2030 | Ket |
|----|-----------|----------------------------|--------|--------------|-------------|-------------|-----|
|    |           | N I H I L                  |        |              |             |             |     |

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Kecamatan Tingkir Kota Salatiga Tahun 2027 ini disusun berdasarkan Renstra Kecamatan Tingkir Kota Salatiga Tahun 2025-2029, agar pelaksanaannya lebih terarah dan terprogram dari satu tahapan ketahapan berikutnya.

Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh Kecamatan Tingkir Kota Salatiga yaitu untuk meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah, maka semua pihak hendaknya ikut mendukung program-program, kegiatan maupun sub kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Tingkir. Untuk mencapai hal tersebut langkah-langkah yang diambil sebagai kaidah pelaksanaan kegiatan:

1. Seluruh pegawai di Kecamatan Tingkir akan mengawal pelaksanaan Renja tahun 2027 sebaik-baiknya sehingga dapat teranggarkan dan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
2. Pelaksanaan program kerja tahun 2027 harus melalui proses yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah yang berlaku;
3. Guna memastikan pelaksanaan program dan kegiatan Renja berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja tahun 2027.

Rencana tindak lanjut perbaikan dalam pelayanan perangkat daerah untuk terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepercayaan publik terhadap pemerintah antara lain Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Digitalisasi dan Inovasi Pelayanan Publik, Pengawasan dan Akuntabilitas Ketat, Perbaikan Infrastruktur dan Sistem Informasi, Meningkatkan Koordinasi dan Kolaborasi antar Perangkat Daerah.

Hal mendasar yang akan menjadi pendukung dan menumbuhkan kerjasama adalah kepedulian dan koordinasi antar instansi atau OPD terkait, tanpa pemahaman untuk kerjasama antar OPD terkait akan sulit rasanya semua rancangan kegiatan yang terprogram ini dapat terlaksana.

Demikian Rencana Kerja Kecamatan Tingkir ini disusun dengan satu harapan agar Kecamatan Tingkir mampu mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

WALI KOTA SALATIGA,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Robby', with a stylized flourish at the end.

ROBBY HERNAWAN